



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 23 Agustus 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Penyesuaian Penggunaan (Refocussing) Kebijakan APBN Tahun 2021; 2. Isu – Isu Aktual dan Solusinya.
Ketua Rapat	: H. MARWAN DASOPANG
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 45 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 1 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua H. Marwan Dasopang dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda membahas “**Penyesuaian Penggunaan (Refocusing) Kebijakan APBN 2021, Isu-isu Aktual dan Alternatif Solusinya**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami total *Refocusing* dan Realokasi Belanja Tahap I sampai IV Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp73,973 miliar (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah*). Dengan demikian Pagu Anggaran Tahun 2021 setelah *refocusing* adalah:

PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2021		
	PAGU AWAL	REFOCUSIN G	PAGU SETELAH REFOCUSIN G
1. Dukungan Manajemen	137.802.438	-7.967.339	129.835.099
a. Operasional:	89.403.847	831.896	90.235.743
o Belanja Oprs Pegawai	51.345.541	3.724.355	55.069.896
o Belanja Oprs Barang	38.058.306	-2.892.459	35.165.847
b. Non Operasional	48.398.591	-8.799.235	39.599.356
2. Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	141.766.500	-66.006.010	75.760.490
a. Operasional:	-	-	-
o Belanja Oprs Pegawai	-	-	-
o Belanja Oprs Barang	-	-	-
b. Non Operasional	141.766.500	-66.006.010	75.760.490
<b>TOTAL</b>	<b>279.568.938</b>	<b>-73.973.349</b>	<b>205.595.589</b>

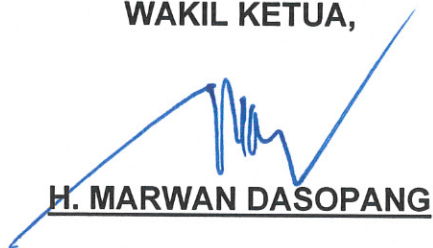
2. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI meningkatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan pada tahun anggaran 2022.
3. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak pada masa pandemi Covid-19.

4. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat untuk meminimalisir kerentanan.
  - b. Meningkatkan kerjasama dengan Komisi VIII DPR RI dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - c. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melengkapi dan memvalidasi data anak yang menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19 serta menyerahkan ke Komisi VIII DPR RI untuk dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan.
  - d. Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Agama RI untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**



**H. MARWAN DASOPANG**